



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PENGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK QRIS
STUDI KASUS DI UMKM KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

**STEPHANIE HENRY SHINTA DEWI
NPM : 211003742018915**

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN SISTEM
PEMBAYARAN ELEKTRONIK QRIS STUDI KASUS DI UMKM KABUPATEN BLORA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

STEPHANIE HENRY SHINTA DEWI
2110033742018915

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN : 0608076201

Anggota,

Dr. Dwinanda Linchia Levi HNK, S.H.
NIDN : 0620129004

Anggota,

Prof. Dr. Setyowati, S.H., MH.
NIDN : 0609096301

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAIN	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pembatasan Masalah	3
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Kegunaan Penelitian.....	4
1.6. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Perlindungan Hukum	8
2.2 Teori tentang Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 2 UU ITE10	
2.3 Konsumen.....	11
2.4 Peran Teknologi dalam Perilaku Konsumen	13
2.5 QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)	13
2.6 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	15
2.7 UMKM Kabupaten Blora	18
2.8 Penelitian Terkait.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Tipe Penelitian Yuridis Normatif	26
3.2 Spesifikasi Penelitian Deskriptif Analitis.....	26
3.3 Sumber Data	27

3.4 Metode Pengumpulan Data	28
3.5 Metode Penyajian Data.....	28
3.6 Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	31
4.1 Gambaran Umum UMKM di Kabupaten Blora	31
4.2 Hasil Pnelitian	31
4.3 Analisis Data	34
4.4 Penanganan Penipuan Pada Pengguna QRIS	39
4.5 Pembahasan	40
BAB V PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Data 50 UMKM di Kabupaten Blora.....	35
Tabel 4.2 Ringkasan Temuan.....	37

ABSTRAK

Inovasi dalam sistem pembayaran digital terus berkembang pesat, salah satunya melalui penerapan kode QR sebagai alat transaksi elektronik. Di Indonesia, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada tahun 2019 sebagai standar nasional untuk pembayaran digital guna meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, dan keamanan transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan QRIS di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Blora, dengan menyoroti berbagai risiko hukum yang sering muncul, seperti kegagalan transaksi, kebocoran data pribadi, dan penipuan menggunakan kode QR palsu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM dan konsumen, observasi lapangan, serta analisis dokumen yang relevan, termasuk regulasi dan kebijakan terkait sistem pembayaran elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan QRIS masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang rendah dari pelaku UMKM dan konsumen terkait hak serta kewajiban mereka dalam transaksi digital, serta keterbatasan dalam implementasi regulasi yang ada. Risiko hukum seperti kegagalan transaksi sering kali disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pendukung, sementara kebocoran data pribadi dan penipuan QR palsu yang kerap kali terjadi mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi bagi pelaku UMKM dan konsumen, peningkatan efektivitas regulasi, serta pengawasan intensif oleh otoritas terkait untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman dan terpercaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam mendukung digitalisasi yang inklusif, terutama di sektor UMKM.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, QRIS, Sistem Pembayaran Elektronik, UMKM, Kabupaten Blora